

Implementasi Kebijakan Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sinarjaya Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

Annisa Nurfadillah¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia
6661200126@untirta.ac.id

Suwaib Amiruddin²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia
suwaib.amiruddin@untirta.ac.id

Nikki Prafitri³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia
nikki.prafitri@untirta.ac.id

ABSTRACT

Stunting remains a national problem that requires serious attention, including in Pandeglang Regency. The Pandeglang Regency Government issued Regent Regulation Number 61 of 2022 concerning the Action Plan for Accelerating Stunting Reduction as a strategic effort to reduce stunting rates. However, in Sinarjaya Village, Mandalawangi District, implementation still faces obstacles such as poor public understanding of the policy's objectives, increasing stunting rates, and poor communication and transparency within the village government. This study aims to analyze the implementation of the Action Plan for Accelerating Stunting Reduction in Sinarjaya Village, Mandalawangi District, Pandeglang Regency. The research method used was qualitative with a descriptive approach through interviews, observation, and documentation validated using source triangulation techniques. The results showed that policy implementation has been carried out through specific and sensitive nutrition interventions such as supplementary feeding (PMT), clean water provision, and nutrition education. However, implementation has not been optimal due to limited human resources, ineffective coordination between implementers, and low levels of community education. Improved cross-sectoral coordination, implementer capacity, and communication strategies are needed to make the program more effective and sustainable.

Keywords: Policy Implementation, Action Plan, Stunting, Sinarjaya Village

LATAR BELAKANG

Secara global, stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak-anak masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling serius dan kompleks. Kondisi ini erat kaitannya dengan faktor kemiskinan, pola konsumsi makanan yang tidak seimbang, serta malnutrisi pada ibu selama masa kehamilan yang menyebabkan gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan. Malnutrisi yang dialami ibu hamil dapat menghambat pertumbuhan linier janin, sehingga bayi lahir dengan berat badan rendah dan berpotensi mengalami stunting di kemudian hari. Anak-anak yang mengalami stunting umumnya memiliki daya tahan tubuh yang lemah, perkembangan kognitif yang lambat, serta prestasi akademik yang rendah, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan di usia dewasa.

Di Indonesia, permasalahan stunting masih menjadi perhatian utama pemerintah karena tingginya prevalensi di berbagai daerah. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting nasional menurun dari 26,9 persen pada tahun 2020 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan, capaian tersebut masih jauh dari target pemerintah yaitu 14 persen pada tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Untuk mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terpadu melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang mencakup berbagai kelompok sasaran mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

Tabel 1. Prevalensi Stunting di Banten 2021 – 2024

No	Kabupaten/Kota	SSGI (2021)	SSGI (2022)	SKI (2023)	SSGI (2024)
1.	Kabupaten Pandeglang	37,8	29,4	28,6	26,4
2.	Kabupaten Lebak	27,3	26,2	35,5	32,4
3.	Kabupaten Tangerang	23,3	21,1	26,4	23,4
4.	Kabupaten Serang	27,2	26,4	23,9	20,2
5.	Kota Tangerang	15,3	11,8	17,6	11,2
6.	Kota Cilegon	20,6	19,1	22,0	19,0
7.	Kota Serang	23,4	23,8	22,3	22,9

8.	Kota Tangerang Selatan	19,9	9,0	9,2	10,5
	Provinsi Banten	24,5	20,0	24,0	21,1

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024

Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah dengan tingkat stunting yang masih cukup tinggi meskipun secara bertahap menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan hasil SSGI, angka stunting di Banten turun dari 24,5 persen pada tahun 2021 menjadi 21,1 persen pada tahun 2024. Namun demikian, Kabupaten Pandeglang tetap menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi di provinsi tersebut. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan kasus bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) sebesar 8,7 persen, yang menjadi indikator risiko tinggi terjadinya stunting. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022–2024. Regulasi ini menekankan pelaksanaan intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung stunting dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.

Berbagai program telah dijalankan sebagai bentuk implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, antara lain pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita, edukasi gizi bagi keluarga, serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menemui banyak kendala, terutama di wilayah pedesaan. Beberapa puskesmas di Kabupaten Pandeglang masih mencatat cakupan pemberian PMT yang rendah karena keterbatasan alokasi dana dari pemerintah pusat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat turut menjadi faktor penghambat keberhasilan program. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang, hanya 2,33 persen penduduk yang menempuh pendidikan tinggi, sedangkan hampir setengahnya hanya tamat sekolah dasar. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, sanitasi lingkungan, dan pola asuh yang tepat dalam 1000 hari pertama kehidupan anak.

Desa Sinarjaya di Kecamatan Mandalawangi merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka stunting. Berdasarkan data, prevalensi stunting di Desa Sinarjaya terus meningkat dari 1,6 persen pada tahun 2021 menjadi 8,5 persen pada tahun 2023. Selain itu, jumlah anak dengan status gizi kurang, kurus, dan gizi buruk juga meningkat signifikan pada tahun yang sama. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan terbatasnya akses informasi terkait program pemerintah. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sinarjaya hanya berpendidikan dasar, bahkan ada yang tidak menamatkan sekolah dasar. Rendahnya pendidikan ini berdampak pada minimnya kesadaran terhadap pentingnya asupan gizi, kebersihan lingkungan, dan pemeriksaan tumbuh kembang anak secara rutin.

Selain permasalahan tersebut, aspek komunikasi dan transparansi pemerintah desa dalam pelaksanaan program stunting juga masih menjadi kendala utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, ditemukan adanya ketidakterbukaan dalam proses penyaluran bantuan dan kurangnya informasi terkait siapa saja penerima manfaat dari program stunting. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menimbulkan kecemburuan sosial antarwarga. Kurangnya koordinasi antarperangkat desa serta minimnya partisipasi masyarakat turut memperlambat keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan rencana aksi percepatan penurunan stunting di Desa Sinarjaya menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi hambatan-hambatan di lapangan serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Pandeglang.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut David C. Korten dalam Tresiana Duadji (2020), implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan keputusan politik, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Korten mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berhubungan, yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana, serta kelompok sasaran atau pengguna. Ketiga unsur ini harus berjalan secara sinergis agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan bukan hanya sekadar menjalankan instruksi dari pemerintah, tetapi merupakan proses adaptif yang memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi penerima manfaat kebijakan tersebut.

Pertama, unsur program itu sendiri mengacu pada isi kebijakan atau rancangan program yang akan diimplementasikan. Menurut Korten, suatu program yang baik harus disusun secara jelas dan realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Program harus memiliki tujuan yang terukur, strategi pelaksanaan yang dapat dilaksanakan, serta indikator keberhasilan yang konkret. Selain itu, substansi program juga harus mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan sumber daya yang tersedia di lapangan. Apabila rancangan program tidak disusun dengan memperhatikan kondisi nyata masyarakat, maka implementasi akan menemui banyak hambatan, seperti ketidaksesuaian antara harapan dan hasil pelaksanaan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk melakukan kajian awal terhadap situasi sosial dan ekonomi di wilayah sasaran sebelum merumuskan program, agar kebijakan yang dihasilkan benar menjawab permasalahan yang ada dan dapat diterima oleh masyarakat.

Kedua, aspek organisasi pelaksana memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Korten menjelaskan bahwa organisasi pelaksana merupakan lembaga atau institusi yang memiliki tanggung jawab

langsung dalam melaksanakan kebijakan di lapangan. Organisasi pelaksana harus memiliki struktur yang jelas, sistem koordinasi yang baik, serta sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki komitmen terhadap tujuan kebijakan. Selain itu, dukungan sumber daya finansial, fasilitas, dan mekanisme birokrasi yang efisien juga sangat dibutuhkan agar proses pelaksanaan dapat berjalan tanpa hambatan. Organisasi pelaksana yang lemah, tidak terkoordinasi, atau tidak memahami isi program dengan baik akan mengakibatkan kebijakan tidak terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pelaksana menjadi kunci penting dalam memastikan agar kebijakan publik dapat diimplementasikan sesuai dengan perencanaan awal.

Ketiga, unsur kelompok sasaran atau pengguna merupakan pihak yang menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan publik. Dalam pandangan Korten, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari seberapa baik pelaksana menjalankan program, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan. Kelompok sasaran harus memahami tujuan dari program tersebut, terlibat aktif dalam pelaksanaan, serta memiliki kesediaan untuk bekerja sama dengan pihak pelaksana. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena tanpa dukungan dan keterlibatan langsung dari kelompok sasaran, kebijakan yang dilaksanakan berpotensi gagal mencapai hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, pelaksana kebijakan harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, melakukan sosialisasi yang intensif, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan.

Kemudian, Korten menekankan bahwa hubungan antara ketiga komponen tersebut harus bersifat harmonis dan saling mendukung. Program yang baik tidak akan memberikan hasil optimal tanpa adanya organisasi pelaksana yang kuat dan kelompok sasaran yang responsif. Demikian, organisasi pelaksana yang profesional tidak akan mampu mencapai tujuan apabila program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan partisipasi masyarakat harus dijaga agar implementasi berjalan efektif. Korten juga menyoroti pentingnya adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal, di mana pelaksana kebijakan perlu menyesuaikan strategi implementasi sesuai dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena dianggap paling sesuai untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara mendalam dan menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi langsung, catatan lapangan, serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan serta menginterpretasikan fenomena yang diteliti secara apa adanya, tanpa adanya manipulasi data maupun intervensi peneliti

terhadap subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2021:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga pendekatan ini membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terarah. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa dari perspektif informan yang terlibat langsung dalam konteks sosialnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan makna di balik setiap fenomena yang terjadi di lapangan.

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai objek yang diteliti sesuai dengan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7), penelitian kualitatif deskriptif lebih menitikberatkan pada pengumpulan data berupa kata-kata, tindakan, dan gambar daripada angka, karena tujuannya bukan mengukur, melainkan memahami. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam dan dideskripsikan agar dapat dipahami secara utuh oleh pembaca. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan fakta yang ditemukan, tetapi juga mencoba menjelaskan hubungan antarvariabel yang muncul dalam proses implementasi kebijakan. Proses analisis dilakukan secara berulang dan mendalam agar dapat memberikan hasil penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang harus mampu menangkap makna dan dinamika sosial yang muncul selama proses penelitian berlangsung.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan cara sistematis untuk menemukan, memahami, serta menginterpretasikan suatu fenomena sosial berdasarkan fakta empiris di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna yang tersembunyi di balik tindakan, persepsi, dan pengalaman informan yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan di Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Peneliti berupaya menggali pemahaman masyarakat dan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut melalui interaksi langsung serta pengamatan terhadap realitas sosial yang terjadi. Langkah ini dianggap penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, peneliti menemukan sejumlah temuan lapangan yang menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa. Temuan ini diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan para informan kunci, observasi langsung di lapangan, serta telaah terhadap berbagai dokumen kebijakan dan data pendukung yang relevan. Dari hasil

pengumpulan data tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek perencanaan, koordinasi antar lembaga, maupun dari tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan percepatan penurunan stunting telah dijalankan, namun efektivitas implementasinya masih belum mencapai tingkat optimal sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam regulasi nasional maupun daerah. Pelaksanaan kebijakan masih cenderung administratif, sementara kegiatan yang bersifat substantif seperti penyuluhan, pemantauan gizi, dan intervensi sensitif belum dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Dengan demikian, temuan ini memberikan gambaran penting bagi pemerintah daerah dan desa untuk melakukan perbaikan yang lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi sosial masyarakat setempat.

Temuan pertama berkaitan dengan aspek program itu sendiri yang merupakan inti dari kebijakan percepatan penurunan stunting. Secara normatif, tujuan kebijakan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022, yang mengatur tentang strategi dan rencana aksi penurunan stunting secara terintegrasi. Namun, implementasi di Desa Sinarjaya masih belum sepenuhnya efektif karena pelaksanaan program belum disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. Program yang dijalankan mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), imunisasi, penyuluhan gizi, serta penyediaan sarana air bersih dan sanitasi. Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan masih bersifat administratif dan belum menyentuh akar permasalahan gizi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat desa.

Kegiatan pemberian makanan tambahan menjadi salah satu bentuk intervensi gizi spesifik yang dijalankan di Desa Sinarjaya, namun pelaksanaannya belum berjalan sesuai standar ideal. Berdasarkan hasil wawancara dengan kader dan bidan desa, kegiatan PMT hanya dilakukan satu kali dalam sebulan karena keterbatasan alokasi anggaran. Padahal, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan, kegiatan PMT idealnya dilakukan setiap hari selama minimal 90 hari berturut-turut agar hasilnya dapat dirasakan secara signifikan oleh anak-anak balita yang mengalami masalah gizi. Kondisi ini membuat hasil intervensi tidak maksimal dan berdampak pada lambatnya penurunan angka stunting di desa tersebut. Selain itu, keterbatasan logistik seperti bahan makanan bergizi dan sarana penyimpanan juga menjadi hambatan tambahan yang dihadapi oleh para pelaksana di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor anggaran dan perencanaan teknis masih menjadi isu utama dalam efektivitas program gizi di tingkat desa.

Selain keterbatasan dalam pelaksanaan PMT, kondisi infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi juga masih menjadi masalah yang cukup serius di Desa Sinarjaya. Berdasarkan observasi di lapangan, masih terdapat beberapa wilayah, terutama di RW 01, yang belum memiliki akses air bersih yang memadai dan fasilitas jamban sehat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masih bergantung pada sumber

air yang tidak layak konsumsi, sehingga meningkatkan risiko penyakit infeksi yang dapat memperburuk status gizi anak. Program penyediaan air bersih dan sanitasi sebenarnya telah masuk dalam rencana intervensi sensitif penurunan stunting, namun implementasinya belum merata dan belum mendapat dukungan lintas sektor yang kuat. Keterbatasan sumber daya serta kurangnya koordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum membuat upaya perbaikan infrastruktur berjalan lambat. Dengan demikian, perbaikan sarana dasar harus menjadi prioritas dalam memperkuat efektivitas kebijakan stunting di tingkat lokal.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berdampak pada pemahaman terhadap tujuan dan manfaat kebijakan stunting. Berdasarkan wawancara, sebagian besar masyarakat di Desa Sinarjaya belum sepenuhnya memahami arti penting gizi seimbang, pola makan sehat, serta dampak jangka panjang stunting terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini menyebabkan program penyuluhan dan edukasi gizi yang dijalankan pemerintah desa belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat sasaran. Beberapa warga bahkan menganggap kegiatan posyandu hanya sebatas penimbangan berat badan tanpa memahami makna pentingnya pemantauan gizi secara berkala. Kurangnya kesadaran ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan agar pesan kesehatan dapat lebih mudah diterima. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi gizi harus terus diperkuat agar masyarakat dapat menjadi subjek aktif dalam pelaksanaan program.

Dalam konteks implementasi kebijakan di lapangan, peneliti juga menemukan bahwa pelaksana program melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, pemerintah desa, bidan, serta kader PKK dan Posyandu. Meskipun demikian, koordinasi antar pelaksana masih belum berjalan secara optimal karena belum adanya forum koordinasi rutin yang dapat mempertemukan seluruh pihak terkait. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peran dan kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Misalnya, masih ditemukan kasus di mana kader posyandu tidak mengetahui detail mekanisme distribusi bantuan stunting yang dikelola oleh pemerintah desa. Kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan proses pelaksanaan program tidak berjalan secara terintegrasi dan sering kali mengandalkan inisiatif individu daripada sistem kelembagaan yang kuat. Oleh sebab itu, diperlukan forum komunikasi lintas sektor di tingkat desa atau kecamatan agar setiap pelaksana memiliki pemahaman yang sama terkait peran dan tanggung jawabnya.

Desa Sinarjaya memiliki total 29 kader aktif yang berperan dalam kegiatan posyandu dan penyuluhan gizi, namun hanya terdapat dua bidan yang menangani seluruh ibu hamil dan balita di wilayah tersebut. Kondisi ini tentu menimbulkan beban kerja yang cukup berat bagi para bidan, karena jumlah sasaran pelayanan sangat tidak sebanding dengan tenaga kesehatan yang tersedia. Para kader berupaya membantu dalam pendataan dan pelaksanaan kegiatan lapangan, tetapi keterbatasan pelatihan membuat mereka belum memiliki kapasitas yang cukup dalam menangani permasalahan teknis gizi

dan kesehatan anak. Selain itu, pelatihan kader yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Akibatnya, kemampuan kader dalam memberikan edukasi dan layanan dasar masih perlu ditingkatkan secara sistematis melalui pelatihan rutin. Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, diharapkan implementasi kebijakan di tingkat akar rumput dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa terdapat miskomunikasi antara pemerintah desa dan para kader posyandu terkait mekanisme distribusi bantuan stunting. Beberapa kader mengaku tidak mendapat informasi yang jelas mengenai jumlah bantuan, sasaran penerima, serta waktu distribusinya. Kondisi ini memunculkan persepsi kurang transparan di kalangan masyarakat yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap pelaksana program. Minimnya sistem komunikasi formal dan dokumentasi kegiatan memperburuk situasi tersebut karena tidak ada acuan yang jelas dalam pelaporan dan evaluasi program. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu membangun sistem komunikasi yang lebih transparan, misalnya melalui grup koordinasi digital atau papan informasi publik yang diperbarui secara rutin. Langkah tersebut akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan program penurunan stunting.

Dari sisi kelompok sasaran, penelitian ini menemukan bahwa program percepatan penurunan stunting di Desa Sinarjaya telah menargetkan remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan data posyandu serta sistem E-PPGBM yang digunakan untuk pemantauan pertumbuhan balita. Meskipun sasaran sudah ditetapkan dengan baik, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan masih tergolong rendah. Banyak ibu yang jarang hadir ke posyandu karena faktor pekerjaan dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan rutin. Hal ini membuat pemantauan perkembangan anak tidak berjalan maksimal dan berdampak pada keterlambatan dalam mendeteksi kasus stunting baru. Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat secara aktif melalui pendekatan berbasis keluarga perlu terus diperkuat agar kesadaran kolektif dalam menjaga kesehatan anak dapat tumbuh dengan baik.

Para kader dan bidan di Desa Sinarjaya sebenarnya telah melakukan pendekatan langsung melalui kunjungan rumah atau door to door untuk memantau kondisi anak dan ibu hamil. Akan tetapi, hasil dari kegiatan tersebut belum terdokumentasi dengan baik karena tidak adanya sistem pencatatan yang sistematis. Sebagian besar laporan masih dilakukan secara manual, sehingga data sulit untuk dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan. Kurangnya fasilitas digital dan pelatihan administrasi juga memperlambat proses pelaporan dari kader ke pihak desa maupun puskesmas. Akibatnya, data lapangan sering kali tidak sinkron dengan laporan resmi yang dikirim ke kabupaten. Kondisi ini menegaskan perlunya digitalisasi sistem pelaporan sederhana agar data perkembangan gizi dapat dimonitor secara real-time dan akurat.

Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, sebagian besar kelompok sasaran mengakui bahwa program percepatan penurunan stunting memberikan manfaat positif. Berdasarkan wawancara dengan ibu balita dan calon pengantin, mereka menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan membantu meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya gizi dan pola hidup sehat. Perubahan perilaku mulai terlihat dari meningkatnya kesadaran untuk membawa anak ke posyandu secara rutin serta memperhatikan asupan makanan bergizi. Namun, sebagian masyarakat masih merasa bahwa bantuan dan program pemerintah belum sepenuhnya merata karena kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek teknis, kepercayaan publik juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan arahan kebijakan nasional, namun belum mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan model implementasi kebijakan David C. Korten, ditemukan bahwa dari aspek program, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala yang cukup kompleks. Meskipun telah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022, beberapa kegiatan utama seperti pemberian makanan tambahan dan distribusi bantuan gizi belum terlaksana secara maksimal akibat keterbatasan anggaran serta distribusi yang tidak merata. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat menyebabkan pemahaman terhadap pentingnya gizi serta tujuan kebijakan masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, maupun program intervensi lainnya yang menjadi inti dari kebijakan penurunan stunting.

Dari aspek organisasi pelaksana, keterlibatan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, pemerintah desa, bidan, kader posyandu, dan PKK menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang cukup baik, namun koordinasinya masih belum berjalan efektif. Miskomunikasi antar pelaksana, terutama antara pemerintah desa dan kader, menimbulkan hambatan dalam pendistribusian bantuan serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan karena jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan jumlah sasaran program. Sementara itu, dari aspek kelompok sasaran, program telah menyentuh target yang sesuai seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, namun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Persepsi negatif terhadap istilah stunting serta kurangnya pemahaman akan dampak jangka panjangnya menjadi faktor utama penghambat keberhasilan kebijakan ini. Meskipun demikian, kegiatan pendampingan dan kunjungan rumah oleh bidan dan kader telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan anak.

REFERENSI

- Agustino; L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi revisi ke-2* (L. Agustino (Ed.); cet. 8, re). Bandung : Alfabeta, 2020.
- Bakari, L., Antu, Y., & Katili, A. Y. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Dan Implikasinya Bagi Kemadiriian Kesehatan Di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitasi Dan Pelayanan Publik*, 10 Nomor 3, 1-14.
- Bedasari, H., Novita, F., Sambuardi, R., & Safitri, P. (2021). Implementasi kebijakan cegah stunting di Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun. *Jurnal Awam*, 1(2), 45–50.
- Candra, A. (2020). *Epidemiologi Stunting*. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Gusdiva, N., Koeswara, H., & Putera, R. E. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok. In *Gema Publica* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.32-49>
- Hardani, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Sains dan Seni ITS*.
- Kemenkes RI. (2011). Panduan Penyelenggaraan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi kurang (Bnatuan Operasional Kesehatan).
- Kemenkes RI. Kementrian Kesehatan RI. (2017). Profil Kesehatan Indonesia Tahun2016. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. J Med dan Rehabil. 2016;
- Kementerian Kesehatan, RI (2020). Panduan Praktis Pemician 5 Pilar STBM. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293–300.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Prenada media Group
- Kurniawan, I., Misnaniarti, M., & Flora, R. (2021). Analisis Implementasi Intervensi Gizi Spesifik dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(4), 328–336.
- Meter, Donald S. Van, dan Carl E. Van Horn. 1975. Administration & Society. Ohio State University Department of Political Science. Vol. 6 No. 4, Februari 1975
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi*. UI-Press. Sage Publications.

- Nelista, Y., & Fembi, P. N. (2021). *Pengaruh Pmebrian Makanan Tambahan Pemulihan Berbahan Dasar Lokal Terhadap Perubahan Berat Badan Balita Gizi Kurang*. 2, 1-7.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(2), 74–83.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Putri S, Rahardjo, Info A. Indonesian Journal of Public Health and Nutrition. 2021;1(3):337–45.
- Putri, & Mahmudiono. (2020). Efektifitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan pada Status Gizi Balita di Wilayah kerja Puskesmas Simomulyo, Surabaya. *Amerta Nutrion*, 58-64.
- Putri S, Rahardjo, Info A. Indonesian Journal of Public Health and Nutrition. 2021;1(3):337–45.
- Rahmanda, F., & Gurning, F. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 HPK di Puskesmas Pagar Jati. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1), 18–2.
- Rosha, Bunga C., et al. "Peran Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif Dalam Perbaikan Masalah Gizi Balita Di Kota Bogor." *Buletin Penelitian Kesehatan*, vol. 44, no. 2, 2016, pp. 127-138.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1).
- Saputra, A. S., Suryoto, S., & Sutikno, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahanstuntingterintegrasi Implementation Of Integrated Stunting Prevention Policy. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13, No.2, 2022, 1–8.
- Sugiyanti, E. (2017). Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Pada Balita Kurang Gizi Di Kabupaten Tuban. *Jurnal Cakrawala*, 11(2), 217–224.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Supriyanto, H., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 241–254. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.177>
- Supriyanto, H., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 241–254. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.177>
- Tresiana, N., Duadji, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. Suluh Media.
- Vaivada, T. et al. (2022). *Stunting in childhood: an overview of global burden, trends, determinants, and drivers of decline*. https://academic.oup.com/ajcn/article/112/Supplement_2/777S/5898920 di akses 15 Juni 2024
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- WHO (World Health Organization). 2016. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. www.pusdatin.kemkes.go.id, di akses 15 Juni 2024
- Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 28–37.
- Wijaya, T. (2018). *Manajemen Kualitas Jas. Edisi Kedua*. PT. Indeks.

Peraturan

- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024